

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Tiongkok adalah salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang. Semua itu dimulai saat Tiongkok sendiri masih berbentuk kekaisaran, ada banyak dinasti kekaisaran Tiongkok yang berkuasa mulai dari dinasti Han, Tang, Sung, Yuan, Ming dan Qing (Gernet, 1996). Kekaisaran tersebut yang membuat Tiongkok menjadi bangsa besar, dan dengan sejarah seperti ini maklum jika Tiongkok memiliki kebudayaan yang kaya dan latar belakang militer kekaisaran yang kuat.

Tiongkok dan Indonesia sendiri berinteraksi antara satu sama lain dimulai dari abad awal abad ke-15 (Ma, 2005). Dimana pedagang muslim tiba dari Tiongkok ke Indonesia dan Malaysia, para pedagang dari Tiongkok ini menetap di sebelah utara pulau Jawa, para pedagang muslim dari Tiongkok dengan mudah berbaur dengan masyarakat yang mayoritas muslim (Tan, 2005).

Interaksi Tiongkok dan Indonesia melalui perdagangan terjadi karena Indonesia sendiri berada di daerah yang dikenal sebagai Jalur Sutra. Jalur Sutra adalah istilah untuk rute perdagangan strategis yang menghubungkan wilayah Timur dan Barat dari dunia, mulai dari Tiongkok ke laut Mediterania. Tempat di Jalur Sutra tersebut tentu dikelilingi oleh bermacam orang dengan bermacam kegiatan, mulai dari berdagang, penyebaran agama, dan seterusnya (Elisseeff, 2001).

Setelah masa ekspedisi kelautan, Indonesia mulai memasuki masa Kolonialisme atau penjajahan. Banyak bangsa yang datang ke Indonesia mulai dari bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang dan semuanya memiliki perwakilan mereka di sini. Pada masa tersebut, banyak orang Tiongkok yang sudah terintegrasi dan menjadi masyarakat Indonesia atau disebut sebagai peranakan, dan mereka menjadi salah satu kelompok masyarakat yang tumbuh besar di Indonesia dan cukup dikenal dan memiliki reputasi.

Saat Indonesia merdeka, Indonesia sebagai sebuah negara baru mendirikan banyak hubungan bilateral dengan negara lain dan Tiongkok adalah salah satu negara sahabat awal pada kemerdekaan Indonesia dan ini dimulai pada tahun 1950.

Indonesia dan Tiongkok memiliki masa lalu yang mirip, dimana keduanya memiliki konflik dengan Jepang, dan hal ini membuat Indonesia dan Tiongkok menjadi kawan dekat. Saat masa awal kemerdekaan di masa pemerintahan Sukarno memengaruhi Indonesia sebagai kawan dekat Tiongkok, hal tersebut dikarenakan Sukarno sangat tertarik dengan paham komunisme dan Indonesia sendiri memiliki partai komunis yang cukup besar atau dikenal dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah Sukarno turun jabatan, penggantinya adalah Suharto dan Suharto sendiri bukanlah simpatisan dari PKI dan komunis, sehingga Suharto memutuskan untuk hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Namun setelah bertahun-tahun tanpa hubungan diplomatik (Zhou, 2013), pada tahun 1990, Indonesia akhirnya membuka kembali hubungan diplomatik tersebut dengan Tiongkok, dan Indonesia dengan pahamnya Politik Bebas Aktif tentunya menginginkan banyak hubungan diplomatik dengan berbagai negara sehingga kebijakan ini masuk akal.

Setelah presiden Suharto lengser, Habibie diangkat menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Naiknya Presiden Habibie merupakan sebuah transisi proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, namun masa pemerintahannya sebagian besar masih terfokus perihal peningkatan citra Indonesia di lingkup internasional. Hubungan Indonesia-Tiongkok di era Habibie belum begitu terlihat, hal ini disebabkan masa pemerintahan yang hanya berlangsung selama setahun.

Indonesia kemudian dipimpin oleh presiden Abdul Rahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gusdur. Pemikiran Gusdur tentang sentiment anti barat di Indonesia yang diikuti perasaan merendahkan diri karena diawasi IMF selama krisis finansial, terlepasnya Timor-Timur yang diikuti intervensi Australia dan tentara PBB membuat Gusdur beralih ke Tiongkok. Tindakan Gusdur yang beralih ke Tiongkok di sebut dengan istilah "Asia First" atau strategi politik luar negeri Asia yang pertama.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), hubungan Indonesia –Tiongkok mulai memasuki babak baru dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti ketika pertama kali di lantik, negara pertama yang dikunjungi oleh Gusdur adalah Tiongkok. Di era pemerintahan Gusdur, Imlek dijadikan hari libur nasional dan hak-hak warga Indonesia keturunan Tionghoa mulai dijamin oleh negara. Gusdur bahkan mengusulkan pembentukan poros Jakarta –Beijing -New Delhi. Dalam lawatannya ke Tiongkok pada 1-3 Desember 1999, Gusdur mengatakan bahwa "*Tiongkok negara besar dengan potensi*

kekuatan ekonomi yang besar. Jadi, kita justru rugi jika tidak berhubungan dengan Tiongkok," (Barton, 2002).

Paska pergantian presiden Gusdur dengan Megawati Sukarno Putri, hubungan antara Indonesia Tiongkok terus ditingkatkan. "Diplomasi dansa" merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan kerjasama Indonesia-Tiongkok terus berlanjut hingga ke presiden selanjutnya yaitu presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY merupakan presiden Indonesia yang begitu fokus pada politik luar negeri dan citra Indonesia di dunia.

Selama dua periode kepemimpinan SBY, terjadi peningkatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara dan SBY menjadikan Tiongkok sebagai mitra strategis Indonesia. Kerjasama Indonesia-Tiongkok yang sudah dibangun, semakin dikelola dengan baik oleh SBY. Kerjasama yang dilakukan kedua negara tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan politik saja, namun juga dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pertahanan hingga pariwisata.

Secara administratif, presiden SBY sejak tahun 2005 telah menandatangani kesepakatan "*Strategic Partnership*" dengan Tiongkok di Beijing. Kesepakatan ini membuat kerjasama Indonesia-Tiongkok semakin luas dan tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja tapi juga dalam bidang politik, keamanan, pertahanan, hukum, hingga kerjasama dalam bidang sosial budaya. Hubungan kerjasama ini kemudian ditingkatkan, tepatnya pada Januari 2010, dilakukan ratifikasi untuk lima tahun rencana kerja atau "five year plan of action" yang bertujuan sebagai mekanisme dialog bilateral pada teknis kerjasama di tingkat urusan regional dan internasional serta untuk menyusun rencana pembiayaan kerjasama".

Setelah memimpin selama dua periode, SBY kemudian digantikan oleh presiden Jokowi. Di era kepemimpinan Jokowi, hubungan Indonesia- Tiongkok menjadi semakin dekat jika dibandingkan dengan kepemimpinan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Di era kepemimpinan Jokowi, Tiongkok memiliki posisi penting dalam politik luar negeri Indonesia. Berbagai macam perjanjian dan kerjasama dilakukan dengan Tiongkok pada era kepemimpinan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dari sektor ekonomi dan perdagangan, hubungan kerjasama kemudian diperluas lagi dalam berbagai bidang. (Bo, 2017)

Indonesia adalah salah satu mitra bagi Tiongkok. Tiongkok sendiri kita ketahui sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dan Tiongkok mememanfaatkannya dengan baik, sebagaimana kita ketahui, banyak penduduk artinya banyak tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan banyak industri serta pabrik-pabrik untuk dibangun. Banyak proposal yang diajukan ke Tiongkok dan salah satunya adalah apa yang menjadi ACFTA atau ASEAN-Tiongkok Free Trading Area.

ACFTA sendiri mulai sebagai konferensi antara kepala negara ASEAN dan Tiongkok di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada 6 November 2001, yang akhirnya disahkan menjadi “Perjanjian Kerjasama Ekonomi antara negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok” di Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002. Perjanjian ini awalnya berfokus pada perdagangan barang saja namun diratifikasi menjadi “Perjanjian Dagang Barang dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa” pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Free Trading Area ini membuka jalan untuk memudahkan perdagangan antara negara ASEAN dan Tiongkok. Sebelum adanya ACFTA ini, banyak yang meragukannya, seperti misalnya pemerintah Indonesia khawatir akan banyak produk murah Tiongkok yang membanjiri pasar Indonesia, dan bisa memberi dampak buruk pada kompetisi dan industri, atau tenaga kerja dari Tiongkok yang mungkin bisa mengalahkan kualitas tenaga kerja Indonesia.

Kerjasama lainnya antara Indonesia dan Tiongkok adalah *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of Tiongkok and The Republic of Indonesia*. Kerjasama ini dibentuk pada 26 Maret 2015 pada konferensi Boao Forum for Asia (BFA) oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini membuka peluang bagi Indonesia agar investasi dan bantuan dana dari Tiongkok mudah masuk.

Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of Tiongkok and The Republic of Indonesia. Merupakan kerjasama yang dibentuk atas kesepakatan presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo, *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of Tiongkok and The Republic of Indonesia* meliputi bidang yang sangat luas, yaitu keamanan, politik, pertahanan, perdagangan, investasi,

pertumbuhan ekonomi, maritim, ilmu penerbangan, sains, teknologi, budaya, urusan internasional, dan urusan regional.

Kedua Presiden menyatakan kepuasan mereka dengan pengembangan hubungan bilateral, menekankan bahwa sejak pembentukan *Strategic Partnership* yang komprehensif, kedua negara telah memperdalam kepercayaan timbal balik politik, mendapat keuntungan dalam kerja sama praktis, dan memperkuat pertukaran antar masyarakat dan budaya. Pendalaman hubungan Tiongkok-Indonesia yang berkesinambungan melayani kepentingan bersama masyarakat kedua negara, dan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas regional serta perkembangan dunia dan kemakmuran. Kedua belah pihak harus melakukan upaya bersama untuk menyoroti fitur khas dari *Strategic Partnership* yang komprehensif, yaitu kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, saling percaya, saling menguntungkan, timbal balik, persatuan, dan koordinasi, di era baru.

Kedua Presiden berpendapat bahwa Tiongkok dan Indonesia memiliki minat yang luas dalam arena regional dan multilateral. Sebagai mitra penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional, mempromosikan kemakmuran dunia dan pembangunan, memajukan kerja sama *South-South*, dan menangani masalah-masalah global, kedua negara harus memperkuat komunikasi dan koordinasi strategis.

Khususnya dalam bidang infrastruktur, kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam kerjasama infrastruktur dan industri, mendorong perusahaan-perusahaan dari kedua negara untuk melakukan pertukaran dan kerja sama di bidang-bidang yang disebutkan di atas seperti kereta api, jalan, pelabuhan, dermaga, bandara, tenaga listrik, tenaga surya, baja, bahan logam *non ferrous*, pembuatan kapal dan bahan bangunan. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga komunikasi yang erat tentang pengembangan Zona Khusus Ekonomi Bitung dan proyek-proyek lainnya, dan mengeksplorasi cara dan metode khusus untuk melakukan kerja sama. Kedua belah pihak menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Infrastruktur dan Kerjasama Industri dan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung antara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Negara- Badan Usaha milik Republik Indonesia.

Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Tiongkok merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk bisa

berkembang melalui bantuan dari negara Tiongkok, terutama bagi Indonesia yang mengalami kendala dalam bidang tenaga ahli dan biaya untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka muncullah rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Implementasi kerjasama *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* dalam bidang infrastruktur antara Indonesia-Tiongkok di Indonesia periode 2015 – 2018?**

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kerjasama *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* di Indonesia periode 2015 – 2018 khususnya dalam bidang infrastruktur.
- Untuk melihat efektifitas kerjasama *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* di Indonesia periode 2015 – 2018 dalam pembangunan infrastruktur dalam negara Indonesia.
- Untuk menganalisa implikasi kerjasama *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* dalam bidang infrastruktur antara Indonesia-Tiongkok di Indonesia periode 2015 – 2018

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan bahan yang diteliti, khususnya *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* dalam bidang infrastruktur antara Indonesia-Tiongkok di Indonesia periode 2015 – 2018.

2. Manfaat Praktis

- Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* antara Tiongkok dan Indonesia.
- Dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti serta bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership* dalam bidang infrastruktur antara Indonesia-Tiongkok di Indonesia periode 2015 – 2018

I.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap isi skripsi secara menyeluruh, penulis membagi laporan ini menjadi 5 (lima) dan dengan sejumlah sub-bab yang saling berkaitan. Bab tersebut diantaranya adalah:

Bab Satu: Pendahuluan

Merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang topik yang dibahas dan kaitannya dengan penelitian skripsi. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan skripsi..

Bab Dua: Kerangka Pemikiran

Bab dua ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang dijadikan komparasi oleh penulis. Selain itu memuat kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis penulis dalam menulis skripsi. Bab ini juga memuat mengenai alur pemikiran serta hipotesis penulis terkait topik yang dibahas

Bab Tiga: Metodologi Penelitian

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian, teknis analisa, pendekatan penelitian serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk membuat skripsi.

Bab Empat: Analisa Penelitian

Bab empat berisikan mengenai faktor dan analisa dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam jenjang waktu tertentu.

Bab Lima: Hasil Penelitian

Bab lima berisikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam jenjang waktu tertentu. Bab ini akan memuat beberapa bab tergantung dari hasil penemuan penulis.

Bab Enam: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran terkait kebijakan maupun konseptual yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi

